ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Ilmu EkonomiFakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

OLEH:

FAJAR INDANIL BAKTI
NIM: 2015/15060084

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DI INDONESIA

Nama	:	Fajar Indanil Bakti
NIM/TM	:	15060084/2015
Jurusan	:	IlmuEkonomi
Keahlian	:	Ekonomi Moneter
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, September 2019

DisetujuiOleh:	DiketahuiOleh:
Ketua JurusanIlmu Ekonomi	Pembimbing
Drs. Ali Anis, MS	Dewi Zaini Putri, SE, MM
NIP. 19591129 198602 1001	NIP. 19850804 2008 12 2 003

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus SetelahDipertahankan di Depan Tim PengujiSkripsi
JurusanIlmuEkonomiFakultasEkonomi
UniversitasNegeri Padang

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DI INDONESIA

Nama	:	Fajar Indanil Bakti
NIM/TM	:	15060084/2015
Jurusan	:	IlmuEkonomi
Keahlian	:	Ekonomi Moneter
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, September 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan		Nama	TandaTangan
1	Ketua	:	Dewi Zaini Putri, SE, MM	1.
2	Anggota	:	Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	2.
3	Anggota	:	Drs. Ali Anis, MS	3.

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	Fajar Indanil Bakti
NIM / TahunMasuk	:	15060084/2015
Tampat / TanggalLahir	:	Batu Gadang / 23 Oktober 1996
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Keahlian	:	Ekonomi Moneter
Fakultas	:	Ekonomi
Alamat	:	Durian Bukur Batu gadang Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman
No. HP / Telepon	:	082269834518
Judul Skripsi	:	Analisis Hubungan Antara Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis /skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karyatulis / skripsiini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia memerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, Agustus 2019
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 19841AHF068856190 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Fajar Indanil Bakti
NIM. 15060084/2015

ABSTRAK

Fajar Indanil Bakti /15060084 : Analisis Kausalitas Antara Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Padang, Dengan Dosen Pembimbing Ibu Dewi Zaini Putri S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan menganailisis hubungan kausalitas (1) kebijakan makroprudensial dan pertumbuhan kredit, dan (2) kebijakan moneter dan pertumbuhan kredit di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari November 2013 sampai dengan Oktober 2018 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Pada analisis induktif dengan menggunakan metode VAR, dengan melakukan beberapa kaidah pengujian yaitu: (1) Uji Stasioneritas; (2) Uji Kointegrasi (berdasarkan hasil uji kointegrasi yang didapat maka penelitian ini harus dilanjutkan dengan metode VECM); (3) Penentuan Lag Optimal; (4) Uji Kausalitas Granger; (5) *Impulse Respon Function;* (6) *Variance Decomposition.*

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa; (1) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara kebijakan makroprudensial dan pertumbuhan kredit di Indonesia; (2) Terdapat hubungan satu arah antara kebijakan moneter dan pertumbuhan kredit, yaitu hanya kebijakan moneter yang mempengaruhi pertumbuhan kredit, namun pertumbuhan kredit tidak mempengaruhi kebijakan moneter di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan perkembangan kondisi dari petumbuhan kredit di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit di Indonesia adalah dengan menekan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI *Rate,* sehingga bank-bank umum juga lebih mempertimbangkan suku bunganya, dengan begitu minat masyarakat untuk melakukan kredit lebih tinggi dikarenakan tingkat suku bunga yang rendah.

Kata Kunci : Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Moneter, Pertumbuhan Kredit,VAR, VECM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul **"*Analisis HuBungan Antara Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia"*** dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namu berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Ibu Dewi Zaini Putri S.E,M.M selaku pembimbing yang telah sabar dan ikhlas menyempatkan atau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan baik itu moral maupun moril, saran-saran, semangat

serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dewi Zaini Putri S.E, M.M selaku pembimbing tunggal yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan sangat sabar mendengarkan keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kak Asma Lidya, A. Md (kak lid) yang telah memberikan motivasi dan masukan serta bantuan kepada penulis dalam penyelesaian administrasi skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2015 dan junior beserta senior yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan dating. Selanjutnya penulis

berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk kita semua.

Padang, 14 Agustus 2019

Penulis

Fajar Indanil Bakti

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
BAB II KAJIAN TEORI **12**
A. KAJIAN TEORI 12
1. Pengertian Kredit 13
2. Giro Wajib Minimum (GWM) 21
3. BI Rate 23
B. PENELITIAN TERDAHULU 27
C. KERANGKA KONSEPTUAL 30
D. HIPOTESIS 31
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis Penelitian 32
B. Tempat dan Waktu Penelitian 32
C. Jenis Data dan Sumber Data 32
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Defenisi Operasional Variabel 33
F. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**
A. Hasil Penelitian 43

B. Pembahasan 72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Hasil uji stabiltas pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial.. 62
Gambar 4.2 : Hasil uji stabilitas pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter 63
Gambar 4.3 : Uji impulse respon function (IRF) pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial 67
Gambar 4.4 : Uji impulse respon function (IRF) pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah kredit, jumlah giro wajib minimum dan Bi Rate dari periode tahun 2010-2017 6

Tabel 4.1 : Perkembangan penduduk tahun 2013-2017 di Indonesia..... 45

Tabel 4.2 : Pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017 berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010 46

Tabel 4.3 : Laju pertumbuhan kredit di Indonesia dari November 2013-Oktober 2018..... 48

Tabel 4.4 : Total Giro wajib minimum di Indonesia dari November 2013-Oktober 2018..... 50

Tabel 4.5 : BI rate di Indonesia dari November 2013-Oktober 2018..... 53

Tabel 4.6 : Hasil uji stasioneritas dengan metode ADF 55

Tabel 4.7 : Uji panjang lag pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial..... 57

Tabel 4.8 : Uji panjang lag pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter 58

Tabel 4.9 : Hasil uji kointegrasi pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial..... 59

Tabel 4.10 : Hasil uji kointegrasi pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter..... 59

Tabel 4.11 : Hasil uji kausalitas granger 59

Tabel 4.12 : Hasil uji kausalitas granger 60

Tabel 4.13 : Uji estimasi VECM pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial..... 64

Tabel 4.14 : Uji estimasi VECM pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter 66

Tabel 4.15 : Uji variance decomposition (VD) pertumbuhan kredit dan kebijakan makroprudensial..... 71

Tabel 4.16 : Uji variance decomposition (VD) pertumbuhan kredit dan kebijakan moneter..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilitas sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian yang berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami defisit kepada pihak yang mengalami surplus (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Suatu pengalokasian dana yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan tidak stabilnya sistem keuangan dan tidak berfungsinya perekonomian secara efisien. Sehingga juga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang bahkan dapat mengakibatkan terjadinya krisis dengan upaya penyelamatan krisis memerlukan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu kestabilan sistem keuangan memang menjadi perhatian dalam perekonomian.

Stabilnya sistem keuangan dipengaruhi lingkungan ekonomi makro yang stabil, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pengawasan institusi keuangan yang efektif serta pembayaran yang aman dan handal. Otoritas yang berperan dalam pencapaian stabilitas sistem keuangan adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiga otoritas tersebut harus mampu menjadi otoritas yang kredibel, mandiri transparan dan akuntabel.

Salah satu krisis global yang disebabkan oleh kredit yaitu krisis keuangan Amerika pada tahun 2008. Krisis ini dimulai dengan rendahnya suku bunga yang mengakibatkan tingginya pertumbuhan kredit terutama kredit perumahan namun

berakhir dengan masalah gagal bayar. Krisis global masih merupakan sumber instabilasi yang paling utama (Bank Indonesia, 2009). Meskipun dampak krisis global terhadap Indonesia relatif terbatas, namun dengan belum berakhirnya krisis tersebut, maka kemungkinan sektor keuangan domestik mengalami tekanan selalu terbuka. Meskipun selama ini krisis global paling berdampak terhadap transaksi internasioanl seperti ekspor dan impor, ada kemungkinan sektor lain juga akan terkena imbas apabila penyelesaian krisis global kian berlarut-larut. Sehingga bank perlu memantau kinerja debitur dengan seksama.

Perbankan merupakan salah satu sub sektor sistem keuangan yang berperan penting dalam stabilitas keuangan yaitu berupa penyaluran kredit. Kegiatan utama bank itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembalike masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana terbesar bagi bank untuk membiayai aktivitas atau kegiatan bank sehari-hari serta usaha bank untuk melakukan aktivitas penyaluran kredit.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melunasi utangya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan (Rahardja,2008).

Pertumbuhan kredit di Indonesia memiliki kaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam upaya untuk meningkatkan kredit diantaranya adanya kebijakan

makroprudensial dan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh otoritas keuangan negara. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu untuk mengatasi resiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekenomian (Bank Indonesia, 2012). Istilah kebijakan makroprudensial baru mencuat dan menjadi perhatian sejak terjadinya krisis keuangan global 2008. Akan tetapi instrument kebijakan makroprudensial sudah dilakukan di berbagai negara untuk mengatasi aspek-aspek spesifik dari risiko sistemik tanpa menyebutnya sebagai kebijakan makroprudensial (Vinals, 2011).

Borio (2013) menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara kebijakan makroprudensial adalah pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan keseluruhan dan tujuan akhir kebijakan makroprudensial adalah menekan biaya krisis. Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan makroprudensial melalui beberapa instrumen salah satunya GWM (Giro Wajib Minimum).

GWM (Giro Wajib Minimum) atau *Reserve Requirement* adalah persyaratan likuiditas bagi perbankan untuk menyimpan dananya dalam bentuk rupiah di Bank Sentral. Besarnya dana yang harus disetor ke Bank Indonesia tergantung presentase tertentu dari total DPK (Dana Pihak Ketiga) rupiah bank (Bank Indonesia, 2012). Hal ini dilakukan agar bank dapat memenuhi kewajibannya terhadap penarikan simpanan masyarakat sewaktu-waktu. Untuk itu setiap bank

harus mengolah likuiditasnya dengan baik agar setiap penarikan dana masyrakat dapat terpenuhi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat dan kegiatan operasional bank berjalan dengan baik.

Giro wajib minimum menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam naik turunnya presentase yang berdampak pada kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Apabila presentase giro wajib minimum diturunkan, maka kemampuan bank dalam memberikan kredit secara otomatis akan meningkat (Ismaulandy, 2014). Begitupun sebaliknya, ketika jumlah kredit yang diberikan telah terlalu banyak atau melampaui ambang batas maka juga diperlukan pengetatatan kebijakan makroprudensial dengan meningkatkan giro wajib minimum agar jumlah kredit tidak terlalu banyak demi menjaga risiko gagal bayar.

Kemudian menurut Lim, dkk (2011) mengevaluasi efektivitas penggunaan instrumen makroprudensial dalam mengurangi risiko sistemik dalam 49 negara dan sebagian instrument salah satunya adalah Giro Wajib Minimum (GWM) efektif mengurangi prosiklikalitas tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada guncangan di sektor finansial. Dengan kata lain guncangan tersebut akan mempengaruhi kinerja penyaluran kredit perbankan yang menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum memberikan dampak yang potensial terhadap pertumbuhan kredit tanpa menarik arus modal masuk bersih dan mengapresiasi nilai tukar.

Selain kebijakan makroprudensial, pertumbuhan kredit di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, bank

memiliki posisi yang sangat penting dalam perekenomian Indonesia karena mendominasi keseluruhan sektor keuangan baik dari segi kepemilikan asset, pengumpulan dan maupun penyaluran dana (Pohan, 2008:85).Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 kebijakan moneter adalah " *kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) dan suku bunga (Bi Rate).* Instrumen dari kebijakan moneter yang mempengaruhi pertumbuhan kredit di Indonesia salah satu di antaranya adalah suku bunga acuan yang di tetapkan Bank Indonesia atau *BI Rate.*

Rendahnya suku bunga yang ditetapkan oleh kebijakan moneter akan menarik minat masyarakat untuk melakukan kredit sehingga kredit meningkat. Sedangkan tingginya suku bunga akan berdampak pada penurunan penyaluran kredit karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun ketika kapasitas kredit itu sendiri yang mengalami masalah seperti penurunan jumlah kredit maka perlu adanya kebijakan moneter untuk menurunkan tingkat suku bunga, ataupun ketika jumlah kredit sudah terlalu tinggi maka kebijakan moneter akan menaikkan tingkat suku bunga. Pada Tabel 1.1 disajikan data jumlah kredit, jumlah giro wajib minimum dan BI rate di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2017 agar dapat dilihat perubahan dari masing-masing variabel setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah Kredit, Jumlah Giro Wajib Minimum dan BI *rate* dari Periode 2010 - 2017

Tahun	Total Kredit (Milyar Rupiah)	(%)	Jumlah Giro Wajib Minimum (Milyar Rupiah)	(%)	BI *rate* (%)
2010	1.595.242	-	141.941	-	6,50
2011	1.984.291	24,38	230.612	62,47	6,50
2012	2.466.539	24,30	274.452	19,01	5,75
2013	3.012.619	22,13	310.280	13,05	7,50
2014	3.489.039	15,81	383.794	23,69	7,75
2015	3.856.311	10,53	428.173	11,56	7,50
2016	4.160.469	7,89	417.620	-2,46	4,75
2017	4.502.313	8,22	426.721	2,18	4,25

Sumber : Bank Indonesia (SEKI),2018

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dilihat bahwa total kredit di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.Total kredit tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4.502.313 miliar rupiah dantotal kredit terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 1.984.291 miliar rupiah. Ini dipicu tingkat pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan dan kebutuhan masyarakat juga meningkat setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari sisi laju pertumbuhan kredit dari tahun 2010-2017 cenderung terjadi perlambatan atau penurunan. Pertumbuhan kredit di Indonesia dari tahun 2010 - 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya namun kembali meningkat pada tahun 2017.

Laju pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 24,38%. Hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan makroprudensial yang diambil pada tahun 2011 yaitu meningkatkan giro wajib minimum. Pada tahun 2011 pertumbuhan giro wajib minimum mengalami peningkatan sebesar 62,47%. Hal ini berarti bank sentral lebih banyak mengambil cadangan simpanan bank namun

kredit tetap meningkat. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kebijakan moneter yang diambil pada tahun 2011 adalah berada pada suku bunga tetap seperti tahun sebelumnya sebesar 6,50%. Hal ini berarti dengan tidak adanya perubahan suku bunga dari tahun sebelumnya, kredit tetap akan meningkat di tahun 2011. Selain itu, Laju pertumbuhan kredit terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,89%. Angka ini merupakan penurunan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 laju pertumbuhan kredit mencapai 10,53%. Namun jika dilihatpada tahun 2016 tersebut kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter malahmelakukan pelonggaran kebijkan dengan mengurangi giro wajib minimum hingga 2,46% sedangkan suku bunga BI Rate turun menjadi 4,75%, sehingga harusnya pertumbuhan kredit meningkat dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan dari Tabel 1.1 juga dapat dijelaskan bahwa total giro wajib minimum (GWM) yang merupakan instrumen kebijakan makroprudensiak dari tahun 2010-2017 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah giro wajib minimum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 428.173 miliar rupiah dan jumlah giro wajib minimum terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 141.941 miliar rupiah. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhan Giro Wajib Minimum dari tahun 2010-2017 cenderung mengalami fluktuaksi. Pertumbuhan giro wajib minimum terendah terjadi pada tahun 2016 dimana turun ke level -2,46 % namun justru ikut menurunkan pertumbuhan kredit pada tahun tersebut dimana pertumbuhan kredit di Indonesia di tahun yg sama hanya tumbuh sebesar 7,89% saja dengan total kredit sebesar 4.160.469 miliar rupiah. Sedangkan pertumbuhan

giro wajib minimum tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 62,47% namun pada tahun yang sama kredit malah tetap mengalami pertumbuhan hingga mencapai 24,38%.

Selain instrumen kebijakan makroprudensia, pada Tabel 1.1 juga dapat dijelaskan intrumen kebijakan moneter yaitu BI Rate yang merupakan acuan tingkat suku bunga pada bank-bank umum di Indonesia yang ditetapakan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Dari tabel 1.1 Bank Indonesia menetapkan BI *rate* berbeda setiap tahun nya dan BI *rate* tertinggi ditetapkan Bank Indonesia terdapat pada tahun 2014 sebesar 7,75% dan terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 4,25%. Pada tahun 2014 merupakan peningkatan BI *rate* tertinggi periode 2010-2017 dimana dapat dilihat pertumbuhan kredit mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 15,81%. Sedangkan BI *rate* terendah yaitu tahun 2017 yang mengalami penurunan menjadi 4,25%, jika dilihat pertumbuhan kredit Indonesia pada tahun yang sama mengalami peningkatan laju pertumbuhan menjadi 8,22%dengan total kredit terbesar yaitu sebesar 4.502.313 miliar rupiah. Hal ini berarti penurunan BI *rate* tahun 2017 ampuh meningkatkan pertumbuhan kredit di Indonesia pada tahun yang sama.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terdapatnya beberapa fenomena yang tidak konsisten terjadi. Pada tahun 2011 perkembangan pertumbuhan kredit di Indonesia terjadi pertumbuhan sebesar 24,38% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terjadinya pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter namun jutsru yang terjadi kedua

kebijakan melakukan pengetatan dimana laju pertumbuhan GWM pada tahun yang sama sebesar 62,47%, begitu pula dengan BI *rate* dimana ditahun 2011 Bank Indonesia menetapkan BI *rate* yang cukup tinggisebesar 6,5%.

Selanjutnya pertumbuhan giro wajib minimum terendah atau mengalami kemerosotan terjadi pada tahun 2016 sebesarl2,46 % seharusnya pertumbuhan kredit meningkatnamun justru ikut menurunkan pertumbuhan kredit pada tahun tersebut. Namun pada BI *Rate* hubungan yang terjadi konsisten ketika terjadi penurunan BI *Rate* maka laju pertumbuhan kredit akan meningkat dan ketika terjadi peningkatan BI *Rate* maka laju pertumbuhan kredit akan turun dikarenakan disaat suku bunga tinggi maka cenderung masyarakat untuk menguragi aktivitas meminjamseperti yang terjadi pada tahun 2014 dan 2017. Maka dari fenemona diatas dapat diketahui beberapa terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang dan kondisi tersebut, dengan demikian penulis tertarik membahas masalah ini melalui penelitian yang berjudul "**Analisis Hubungan Antara Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kausalitas antara kebijakan makroprudensial dengan pertumbuhan kredit di Indonesia?

2. Apakah terdapat kausalitas antara kebijakan moneter dengan pertumbuhan kredit di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kausalitas antara kebijakan makroprudensial dengan pertumbuhan kredit di Indonesia.
2. Kausalitas antara kebijakan moneter dengan pertumbuhan kredit di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
   a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang penelitian ilmiah.
   b) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi ilmu Pengetahuan

   Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada masalah yang sama diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan Ekonomi Moneter dan Ekonomi Makro.

3. Bagi pihak lain

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah atau instansi terkait seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengambil kebijakan agar bisa melihat lebih cermat hubungan kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia.

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) adalah sistem keuangan yang stabil yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan *(shock)* yang terjadi sehingga dapat mencegah gannggguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan (Bank Indonesia). Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.

Gooheart *et al.* dalam Nayn dan Siddiqui (2012), mengatakan bahwa pemantauan kondisi stabilitas perbankan dapat dilihat dari indikator profitabilitas. Kemudian Afanasief melakukan penelitian pada variabel *Net Interest Margin* (NIM) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan salah satu elemen dari efisiensi perbankan dengan mengatakan kedua variabel tersebut berpengaruh positif dalam perubahan profit yang didapat oleh bank (Aini ,2013), Semakin tinggi nilai NIM maka semakin besar keuangan yang didapat oleh bank sehingga semakin membaik kondisi perbankan, sedangkan semakin besar nilai BOPO meka semakin kecil keuntungan yang didapat oleh bank dan semakin buruk kondisi bank.

Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya bukan merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan yang menyalurkan kredit.

a Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badrulzaman (2005), menyatakan bahwa kredit mempunyai arti.

a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi *"credere"* yang artinya "percaya".Dalam bahasa Belanda istilahnya *"vertrouwen",* dalam bahasa Inggris *"believe"* atau *"trust"* atau *"confidence"*, yang kesemuanya berarti percaya . Jika dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku pemberi kredit percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu tertentu. Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah

dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur "kepercayaan", walaupun sebenarnya kredit itubukan hanya sekedar kepercayaan .

Pasal 1 angka (11) Undang-undang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) UU Perbankan, sebagai berikut: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip konvensional kontra

prestasi yang diberikan debitur adalah berupa “bunga”, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang)yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

a. Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno (2003) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

3) Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akanditerima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
4) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Halle (2009:9) menyatakan, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk :

1) Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.

2) Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis cashflow usaha debitur.
3) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.
4) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

b. Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya guna uang.

   Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas pada sebagai alat tukar dan pembayar saja.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

   Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang.

Dengan menggunaan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

4) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

   Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

   Bagi pengusaha yang kekurangan modal makasalah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

   Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru. Sementara itu, bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrument kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi.Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa: “Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Jadi, dijelaskan bahwa kredit dalam bentuk dana hanya diselenggarakan oleh lembaga perbankan, adapun fungsi dan tujuan dari kredit itu sendiri adalah untuk menunjang produktivitas perekonomian masyarakat disamping itu bagi bank kredit diharapkan dapat memberikan pendapatan dari bunga pinjaman.

Kesimpulannya fungsi dan tujuan kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan ketersediaan modal usaha bagi masyarakat/pelaku usaha dan dapat memberikan pemasukan bagi bank melalui pendapatan lewat bunga pinjaman.

2. GWM (Giro Wajib Minimum)

GWM (Giro Wajib Minimum) atau *Reserve Requirement* adalah persyaratan likuiditas bagi perbankan untuk menyimpan dananya dalam bentuk rupiah di Bank Sentral. Besarnya dana yang harus disetor ke Bank Indonesia tergantung presentase tertentu dari total DPK (Dana Pihak Ketiga) rupiah bank (Bank Indonesia, 2012).Giro wajib minimum menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam naik turunnya presentase yang berdampak pada kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. Apabila presentase diturunkan, maka kemampuan bank dalam memberikan kredit secara otomatis akan meningkat (Ismaulandy, 2014).

Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Untuk menciptakan stabilitas moneter diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomidan keuangan global yang berpotensi menimbulkan kekurangan likuiditas perbankan.Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untukmencapai stabilitas moneter adalah melalui pengaturan likuiditas perbankan.Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan giro wajib minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau*Excess Reserve* terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki Bank

Pemenuhan Giro wajib Minimum (GWM) atau *reserve requirement* atau disebut *statutory reserve* sejak 2004 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/49/PBI/2005. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 tentangGiro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam valuta rupiah dan valuta asing. Namun tidak berselang lama, Bank Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui PBI No.10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro

Wajib Minimum di Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga. GWM terdiri dari GWM rupiah dan GWM valuta asing. GWM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GWM} = \frac{GiroPadaBI}{DanaPihakKetiga} \text{ X } 100 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

a. Giro Wajib Minimum Valuta Rupiah

Bank wajib memenuhi GWM valuta rupiah yang ditetapkan sebesar 7,5% dari DPK. GWM valuta rupiah ini dipenuhi dari GWM utama sebesar 5% dari DPK dan GWM sekunder 2,5% dari DPK. GWM utama yaitu simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, sedangkan GWM sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve. Excess Reserve adalah kelebihan saldo rekening giro rupiah bank dari GWM utama.

b. Giro Wajib Minimum Dalam Valuta Asing

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Rata–rata harian total DPK dalam valuta asing adalah pada

seluruh kantor Bank di Indonesia. DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito dan kewajiban – kewajiban lainnya.

3. BI *Rate*

BI rates menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id). BI rates diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernurbulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id).

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan (www.bi.go.id).

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya

Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id).

Menurut Laksmono (2001) nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang kurang fleksibel. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu didalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang (Kurniawan, 2004).

Menurut Darmawi (2006:181) tingkat bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam untuk memperoleh dana dari pemberi pinjaman untuk jangka waktu yang disepakati. Dengan kata lain, tingkat bunga dalam hal ini merupakan harga dari kredit. Namun harga itu tidak sama dengan harga barang di pasar komoditi karena tingkat bunga sesungguhnya merupakan suatu angka perbandingan, yaitu jumlah biaya pinjaman dibagi jumlah uang yang sesungguhnya dipinjam, biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun. Suku bunga terdiri darisuku bunga riil dan suku bunga nominal.

Mankiw (2003:89) menyatakan bahwa "*the nominal interest rate is sum of the real interest rate and the inflation rate*".Suku bunga nominal adalah

jumlah suku bunga riil ditambah laju inflasi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$r = i - \pi \qquad \text{.....................................} (2)$$

dimana :
r = suku bunga riil
i = suku bunga nominal
π= laju inflasi

Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan besarnya bungayang harus dibayar oleh pihak peminjam dana. Sedangkan tingkat bungariil menunjukkan persentasi dari nilai riil modal ditambah bunganya dalam setahun, dinyatakan sebagai persentasi dari nilai riil modal sebelum dibungakan (Sukirno, 2000: 386).

Sedangkan Sjahrial (2006:7) menyatakan bahwa tingkat bunga adalah kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman. Dari sudut peminjam merupakan biaya dari dana yang mereka pinjam. Menurut Laksmono (2001), ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara suku bunga yang berbeda jangka waktu. Yang pertama Segmented Market Theory, mengatakan bahwa masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Kedua Expectation Theory menganggap instrumen jangka waktu

berbeda dapat saling berganti secara sempurna. Suku bunga merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Ketiga Preferred Habitat Theory mengatakan bahwa suku bunga jangka panjang merupakan rata-rataekspektasi suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang ditambah denganliquidity premium yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat itu.

The loanable fund theoryof interest rate adalah harga dari dana investasi, dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Sedangakan *The rational expectation theory* menekankan peranan yang dimainkan oleh pengharapan masyarkat yang berkenaan dengan tingkat bunga dan perekonomian serta oleh dampak infoemasi terbaru dalam mengerakan tingkat bunga ke suatu ekuilibrium (Darmawi, 2006:182).

Dengan demikian, tingkat bunga merupakan biaya modal yang dipandang sebagai indikator pengaruh kebijakan moneter, terhadap keseimbangan pendapatan (sektor riil). Menurut Sadono Sukirno (2002: 385) didalam teori, analisis mengenai penentuan tingkat bunga selalu menanggap bahwa dalam perekonomian hanya terdapat satu tingkat bunga. Namun, dalam kenyataan keadaannya sangat berbeda. Tingkat bunga pinjaman pemerintah berbeda dengan tingkat bunga yang dibayarkan kepada konsumen dan Bank mengenakan tingkat bunga yang berbeda-beda kepada para nasabahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Perbedaan risiko

b. Jangka waktu pinjaman

c. Biaya adminisatrasi pinjaman

Menurut Hermawan Darmawi (2006:188) tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam berbagai kegiatan perekonomian sebagai berikut :

a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
b. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berivestasi pada real assets ataukah pada financial assets.
c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Agar mendukung penelitian yang penulis lakukan maka sangat diperlukan penelitian sebelumnya. Hal penelitian yang relevan ini merupakan bagian yang mengurai tentang pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Glocker dan Pascal Towbin (2014) tentang *Reserve Requirement as a Macroprudential Instrument – Empirical Evidence from Brazil* yaitu giro wajib minimum sebagai instrument dari kebijakan makroprudensial dengan bukti empiris dari Brazil. Penelitian ini mejelaskan

konsekuensi makroekonomi dari perubahan Giro wajib minimum ketika bank sentral juga mengatur tingkat suku bunga, peningkatan diskresioner dalam giro wajib minimum menyebabkan kontraksi dalam kredit domestik Brazil. Apalagi itu juga memperkuat peningkatan pada pengangguran, tingkat depresiasi, peningkatan akun berjalan, dan meningkatnya tingkat harga. Dalam penelitan ini Giro Wajib Minimum dapat berfungsi sebagai pelengkap kebijakan suku bunga untuk stabilitas keuangan, tetapi tidak dapat dapat menggantikan kestabilan harga. Perubahan Giro Wajib Minimum memiliki efek makroekonomi mendukung pentingnya saluran peminjaman bank. Metode yang digunakan adalah metode analisis VAR . Hasil penelitian menujukkan yang pertama adalah dari kerangka kebijakan moneter dimana efek perubahan Giro Wajib Minimum ketika bank sentral sekaligus menetapkan tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah pentingnya bank jika bank bisa dengan mudah diganti melalui sumber pendanaan lainnya, maka Giro Wajib Minimum akan menjadi instumen kebijakan yang kurang efektif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Paolo Gelain dan Pelin Ilbas (2017) tentang *Monetary and Macroprudential Policies in an Estimated Model with Financial Intermediation.* Penelitian ini menjelaskan bahwa model Smets-Wouters yang menampilkan sektor perbankan Gertler-Karadi pada data AS menggunakan real dan finansial yang dapat diamati.Keuntungan potensial dari koordinasi tergantung pada seberapa penting kesenjangan output dalam kebijakan makroprudensial. Konflik koordinasi dapat dihindari dengan menetapkan

kepentingan yang serupa dengan tujuan bersama ini dalam masing-masing kebijakan. Ketika diperoleh hasil yang optimal untuk kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial di bawah koordinasi, ditemukan bahwa kedua pembuat kebijakan harus menempatkan bobot yang lebih tinggi daripada kesenjangan output.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Michael T. Kiley dan Jae Sim (2017) tentang *Optimal Monetary and Macroprudential Policies : Gaints and Pitfalls in a Model of Financial Intermediation.* Penelitian ini menjelaskan bahwa model keseimbangan umum kuantitatif dengan kekakuan nominal dan intermediasi keuangan untuk menguji interaksi kebijakan stabilisasi moneter dan makroprudensial. Model yang diestimasi menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak harus merespon dengan kuat terhadap siklus kredit dan hanya dapat melindungi sebagian ekonomi dari efek distorsi dari gesekan atau guncangan keuangan

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh William J. Tayler dan Roy Zilberman (2016) tentang *Macroprudential Regulation, Crdit Spreads and the Role of Monetary Policy.* Penelitian ini menjelaskan peran makroprudensial dari regulasi permodalan bank dan kebijakan moneter dalam model saluran biaya pinjaman dengan friksi keuangan endogen, didorong oleh risiko kredit, kerugian bank, dan biaya modal bank.Gesekan ini menyebabkan mekanisme akselerator keuangan memacu pemeriksaan terhadap alat makroprudensial.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Peter Tillman (2015) tentang *Estimating the Effects of Macroprudential Policy Shock: A Qual VAR Approach*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Qual VAR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode yang lainnya dan dapat disimpulkan bahwa pengetatan makroprudensial efektif dalam menghambat pertumbuhan kredit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian, tempat penelitian, dan jenis variabel yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat pertumbuhan ekredit dengan variabel bebasnya: kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter. Metode analisis yang digunakan adalah analisis VAR. Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk kelengkapan teori pada skripsi penulis.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep unutuk menjelaskan, menerapkan, dan menetukan persepsi keterkaitan antara variabel yang di teliti berdasarkan permasalahan dengan berpijak pada kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanyahubunga variabel kebijakan makroprudensial (Y2) dan kebijakan moneter (Y3) terhadap pertumbuhan kredit (Y1).

Adanya kebijakan makroprudensial dengan indikatorGiro Wajib Minimum (GWM) diduga memiliki hubungannegatif terhadap pertumbuhan kredit di Indonesia.Artinya, semakin tinggi tingkat perubahan Giro Wajib Minimum maka akan semakin rendah pertumbuhan kredit di Indonesia dan begitu sebaliknya. Hal

ini terjadi karena bank akan mengalami keterbatasan penyaluran dana kemasyarakat ketika giro wajib mimun ditingkatkan.

Kebijakan moneter dengan indikator BI Rate diduga memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan kredit di Indonesia. Artinya, semakin meningkat BI Rate makaakan semakin menurun pertumbuhan kredit di Indonesia dan begitupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena ketika suku bunga BI Rate yang meningkat maka akan meningkatkan biaya pengembalian sehingga mengurangi minat masyarakat untuk melalukan kredit.

Maka dapat disimpulkan kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter secara bersamaan memiliki hubungan denag pertumbuhan kredit di Indonesia.Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

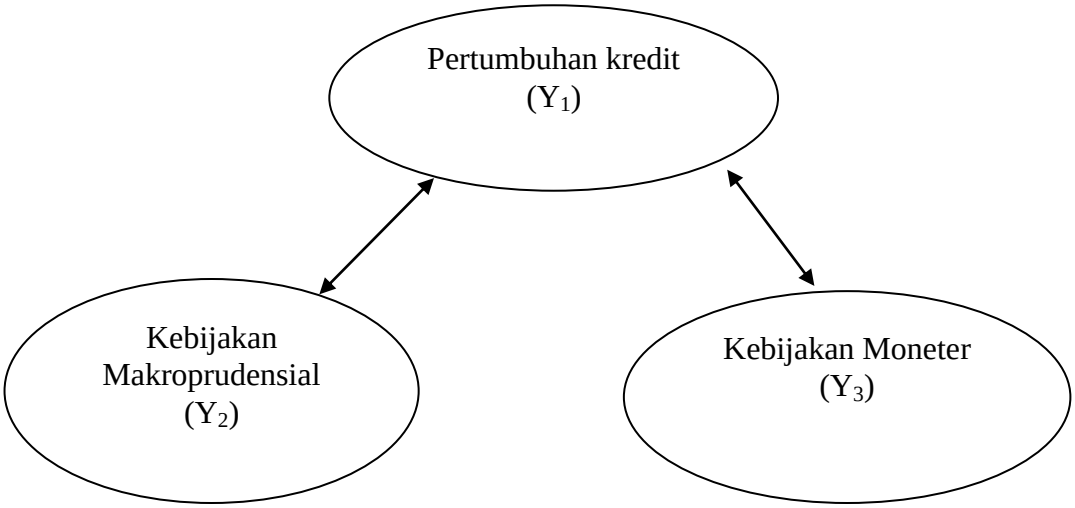

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Hubungan Antara Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan Moneter Terhadap Kredit Di Indonesia

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan kausalitas antara kebijakan makroprudensial dengan pertumbuhan kredit.

   $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

   $H_a : \beta_1 \neq 0$ (berpengaruh signifikan)

2. Terdapat hubungan kausalitas antara kebijakan monete rdengan pertumbuhan kredit.

   $H0 : \beta 2 = 0$ (tidak berpengaruh signifikan)

   $H_a : \beta_2 \neq 0$ (berpengaruh signifikan).

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil uji kausalitas granger yang telah dilakukan diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat hubungan antara kebijakan makroprudensial (giro wajib minimum) dan pertumbuhan kredit di Indonesia. Berdasarkan hasil uji granger diketahui bahwa kebijakan makroprudensial (giro wajib minimum) dan pertumbuhan kredit tidak terdapat pengaruh antar keduanya.
2. Terdapat hubungan satu arah antara kebijakan moneter (BI *Rate*) dan pertumbuhan kredit di Indonesia. Berdasarkan hasil uji granger didapatkan bahwa kebijakan Moneter (BI *Rate*) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Artinya, hanya variabel kebijakan moneter (BI *Rate*) yang mempengaruhi pertumbuhan kredit di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliian dan pembahasan diatas, adapun saran yang penelitian ajukan yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia khususnya Bank Indonesia selaku Bank sentral Indonesia yang memeiliki wewenang mebuat kebijakan terkait sistem moneter di Indonesia lebih memperhatikan lagi penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan-perbankan, baik melalui kebijakan yang telah ada seperti kebijakan makroprudensial (giro wajib minimum)

maupun kebijakan yang akan diterapkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi meningkat.

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit sebaiknya Bank Indonesia lebih memperhatikan kembali penetapan suku bunga acuan atau BI *Rate* yang menjadi pedoman Bank-bank umum dalam menetapkan suku bunga, agar apa yang telah ditetapkan benar-benar menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik perbankan maupun masyarakat.
3. Perbankan selaku perantara penyaluran kredit yang dihimpun dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebaiknya lebih memerhatikan kelayakkan calon kreditur berhak atau tidak, pantas atau tidaknya diberikan kredit supaya tidak terjadi masalah-masalah dikemudian hari seperti kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Akram, Q Farooq. 2014. *Macro Effects Of Capital Requirements And Macroprudential Policy*. Economic Modelling .

Ariefianto,Moch.Doddy.2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi Dengan menggunakan Eviews.* Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

Bank Indonesia. 2010-2017. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia* : Jakarta.

Darmawi, Harman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*.Jakarta : Bumi Aksara

Desi Pujiati, Maria Ancela, Beny Susanti dan Mujiyani. 2013. *Pengaruh Non Performing Loan Capital Adequacy Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt. Bank Central Asia, Tbk.Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Bandung: Universitas Gundarma.

Dwinur Arianti, Rita Andini dan Rina Arifati. 2016. *Pengaruh BOPO, NIM, NPL Dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Publik Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014*.Journal Of Accounting, Vol 2 No. 2. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Semarang: UniversitasPandanaran.

Glocker, Christian. Towbin, Pascal. 2015.*Reserve Requirements as a macroprudential Instrument- Empirical Evidence From Brazil*. Journal of macroeconomic.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi.* Erlangga : Jakarta.

Rahardja, Prath ama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Greydi Normala Sari. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia (Periode 2008.1-2012.2*).Jurnal EMBA. Vol. 1 No.3; 931-941. ISSN: 2303-1174. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manado: Universitas Sam Ratulangi.